

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN BERLAKUKANNYA INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2025 DI KABUPATEN BUNGO

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Presiden Republik Indonesia, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran transfer ke daerah atau TKD akan memberi *impact* terhadap alokasi belanja daerah (APBD). Sumber pembiayaan dan belanja daerah Kabupaten Bungo selama ini jika dipersentasekan lebih kurang 82 % berasal dari transfer pemerintah pusat. Selama Tahun 2024 dana transfer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Bungo sebesar Rp.1,183,13 M dan yang terealisasi masuk ke Kas daerah sebesar Rp. 1.056,32 M, pada Tahun Anggaran 2025 di tetapkan sebesar Rp. 1.370,87 M dan terealisasi sampai dengan September sebesar Rp. 839,40 M. Pada Tahun Anggaran 2024 diprediksikan tidak akan terelaisasi seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 oleh adanya kebijakan efisiensi pemerintah pusat atau relokasi anggaran pembangunan daerah.

II. PEMBAHASAN

Besaran anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2025 sebesar lebih kurang Rp. 1,3 T yang bersumber dari Transfer Pusat dan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 230,86 M baru terealisasi sampai dengan September 2025 sebesar Rp.116,95 M.

Sementara itu untuk merealisasi VISI MISI Bungo Baru 2025-2030 dengan tujuh (7) Program Prioritas tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, diasumsikan lebih kurang sebesar 1,8 T sampai dengan 2 Triliun pertahun belum termasuk pembiayaan gaji dan TPP untuk pegawai P3K penuh waktu. Artinya pemerintah Daerah Kabupaten Bungo akan mengalami defisit yang signifikan kedepannya. Ada tujuh (7) Program Prioritas VISI MISI Bungo Baru yang akan dibiayai sampai dengan Tahun 2030 yaitu :

1. Infrastruktur Berkualitas
2. Prowitra
3. Kartu Bungo Pintar
4. Kartu Bungo Sehat
5. Revitalisasi Pasar atas, Pasar bawah dan Kota Muara Bungo
6. Revitalisasi Masjid Agung Al-Mubarak
7. Bungo Tekhnopark.

Pembiayaan yang paling besar adalah untuk merealisasikan program unggulan atau prioritas Bungo Baru seperti penanganan Infrastruktur Jalan Kabupaten Jujuhan Ilir, Jalan Kabupaten Kuamang Kuning dan Jalan Kabupaten Kecamatan Rantau Pandan serta Program Sawit Rakyat (Prowitra). Disisi lain Pemerintah Daerah harus memasukkan Pokir anggota DPRD tentu akan menambah anggaran belanja daerah. Tujuan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan pembangunan nasional melalui *SDGs* adalah kependekan dari *Sustainable Development Goals* atau disebut juga sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dilansir dari situs ITS, *SDGs* merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri permasalahan dunia, seperti kemiskinan, kesenjangan dan lingkungan.

Mari kita lihat kondisi perekonomian Kabupaten Bungo selama Tahun 2024 sebagai indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo Tahun 2024 adalah 3,30 % dan pada Tahun 2023 tumbuh

4,66 % hal ini jelas terjadi perlambatan. Sektor apa saja dari Lapangan Usaha dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memberikan nilai ungkit lebih tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo selama Tahun 2024 ada lima (5) Item yaitu : 1) Administrasi Pemerintahan 15,06 %. 2) Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dan food service dan activities 14,06 %. 3) Jasa Kesehatan 15,12 % 4) Jasa Pendidikan 11,67 %. 5) Jasa Perusahaan 10,75 % selebihnya berada dibawah 10 % dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo.

Bila dikomparasikan dengan Lapangan Usaha dari Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Jasa Pergudangan dan Transfortasi serta perdagangan besar dan Eceran yang berada dibawah 10 % atau diantara 4 - 8 %, sektor pertambangan dan Penggalian minus ditujuh persen (-7 %). Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Kabupaten Bungo bergerak di sektor yang tidak banyak dikuasai masyarakat kecil tetapi lebih dikuasai sebagian kecil kelompok orang yang relative punya modal besar dan khusus serta ketergantungan pada *government spending*, terkecuali pada Sektor Kuliner dan Rumah Makan.

Bagaimana dengan Sektor Usaha Menengah Kecil (UMKM), Sektor ini lebih tumbuh tercermin dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman yaitu sebesar 14,06 %, pemerintah secara kontinyu harus memberikan dukungan besar terhadap sektor ini agar terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar, dengan demikian akan meningkatkan *demand* dan produksi yang dihasilkan masyarakat.

Angka Pengangguran Kabupaten Bungo 2025.

Angka pengangguran terbuka Kabupaten Bungo sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar 9.036 jiwa angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan angkatan kerja Kabupaten Bungo yang berjumlah sebesar 184,31 ribu jiwa, untuk menurunkan angka pengangguran ini perlu adanya program yang menyentuh langsung kekalangan bawah atau non formal. Tenaga kerja yang menganggur dari sektor petambangan disebabkan oleh banyaknya perusahaan tambang yang tutup baik yang legal maupun dari dampak meningkatnya razia PETI dan bekerja pada

sektor non formal atau serabutan, mereka inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah karena menjadi tanggungan biaya pemerintah baik luran (BPJS) Kesehatan maupun bantuan atau Subsidi Pemerintah lainnya.

Program Prioritas Bungo Baru.

a. Program prioritas Bungo Baru yang secara langsung (*direc*) menyentuh kepada masyarakat banyak atau publik adalah UMKM Masyarakat Dusun serta Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

b. Program Prowitra.

Program Prowitra dalam jangka pendek akan berdampak melalui pemberdayaan tenaga kerja penanaman dan pemeliharaan kebun sawit namun tidak signifikan, dalam jangka panjang 4 sampai 15 Tahun kedepan baru akan berdampak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo.

III. PENUTUP

Menurut pandangan penulis program prioritas Bungo Baru mesti lebih rinci dan tajam menyasar sampai kedusun-dusun karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo berdomisili di Dusun-Dusun, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dikalangan bawah, dengan tetap memperkuat sektor pertanian, perkebunan baik kelapa sawit maupun tanaman perkebunan lainnya serta meningkatkan investasi dengan menarik perusahaan atau pabrik ke Kabupaten Bungo. Memberikan *skill* dan edukasi bagi pengangguran atau tenaga kerja usia produktif agar bisa diterima oleh pasar kerja lokal maupun *domestic*, dengan demikian probality menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dapat lebih signifikan.

Terkait dengan defisit anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang akan membayangi pemerintah, pemerintah daerah perlu keberanian dan membuat terobosan untuk menciptakan peluang *income* rutin setiap bulannya seperti mendirikan SPBU milik pemerintah dibawah pengelolaan BUMD dan memiliki perkebunan kelapa sawit plat merah tentu mengacu kepada aturan

yang berlaku, dengan *fiscal* yang cukup maka akan dapat mewujudkan program-program unggulan Bungo Baru dan jika pemerintah daerah tidak mempunyai *income* tambahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, maka besar kemungkinan program unggulan Bungo Baru akan sulit terwujud sepenuhnya sampai dengan Tahun 2030.

Muara Bungo, 16 September 2025

Dr. Muslim, S.IP, M.Si
Analisis Kebijakan Bappeda Kabupaten

Bungo

Sumber :

1. *Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia DJPK-RI*
2. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2025*
3. *DetikCom. [Apa Itu SDGs? Ini Pengertian dan 17 Tujuan Globalnya](#)*